

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

Sekretariat Daerah
Tahun 2022



SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 dapat diselesaikan.

LKjIP ini mempunyai makna yang sangat penting sebagai suatu media hubungan kerja organisasi yang berisi informasi dan data yang telah diolah. Selain itu LKjIP merupakan wujud pertanggungjawaban tertulis suatu organisasi kepada pemberi wewenang dan mandat untuk menjalankan kegiatan dan penggunaan anggaran. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Keberhasilan pembangunan di Kabupaten Magelang sebagaimana dituangkan dalam dokumen ini, merupakan wujud kerja keras seluruh aparatur Pemerintah Daerah di lingkungan Kabupaten Magelang termasuk peran Sekretariat Daerah dan dukungan serta partisipasi masyarakat dan berbagai elemen kemasyarakatan, dunia usaha dan pendidikan yang telah memberikan sumbangsihnya untuk kemajuan Kabupaten Magelang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 ini disusun, semoga dapat menjadi bahan evaluasi kinerja guna perbaikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang.

Kota Mungkid, 16 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAGELANG,

Drs. ADI WARYANTO
Pembina Utama Madya
NIP. 19660304 199203 1 007

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis. Laporan ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran strategis sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan dokumen perencanaan, sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja sasaran strategis dilakukan berdasarkan tingkat pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tingkat Kabupaten Magelang Tahun 2022. Pada Tahun 2022 Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang telah menyusun dan melaksanakan Perjanjian Kinerja (PK) yang terdiri dari 3 (tiga) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran, yang dilaksanakan oleh 9 (sembilan) bagian yang ada di Sekretariat Daerah.

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang tahun 2022 telah mencapai 100% (*Sangat Tinggi*) dibandingkan dengan target tahun 2024 pada akhir periode Renstra dengan capaian 96,41 (*Sangat Tinggi*). Pelaksanaan sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang didukung 3 program dengan jumlah anggaran Rp 34.996.074.932,00 realisasi anggaran dalam menunjang capaian sasaran strategis sebesar Rp 34.017.939.339,00 (97,21%), persentase realisasi keuangan masuk dalam kategori *sangat tinggi*.

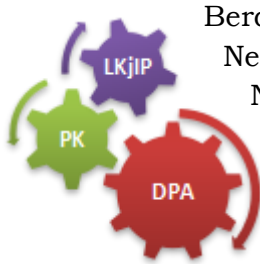
Efisiensi capaian kinerja sasaran strategis atas penggunaan sumberdaya sebesar 6,19% (enam koma sembilan belas persen), tetapi tingkat efisiensi ini belum mencerminkan efektifitas penggunaan sumberdaya khususnya dalam penggunaan anggaran, perlu dilakukan analisa yang lebih mendalam atas persentase penyerapan anggaran dibandingkan dengan realisasi fisik per kegiatan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum.....	1
C. Maksud dan Tujuan.....	2
D. Aspek Strategi Organisasi.....	2
E. Permasalahan Utama Organisasi.....	7
F. Sistematika.....	7
BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Ikhtisar Perjanjian Kinerja.....	8
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	11
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2022.	13
C. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....	19
D. Prestasi.....	20
BAB IV : PENUTUP	
Penutup.....	22
LAMPIRAN	

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang



Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

LKjIP Tahun 2022 yang disusun oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta sebagai penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

A	Latar Belakang
B	Landasan Hukum
C	Maksud dan Tujuan
D	Aspek Strategis Organisasi
1	Visi dan Misi
2	Letak Geografi
3	Pembagian Wilayah Organisasi
4	Organisasi Perangkat Daerah
E	Permasalahan Utama Organisasi
F	Sistimatika

B. Landasan Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

- Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020; Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 75);
 8. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;
 9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022;
 10. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan LKjIP adalah:

1. Menilai tingkat capaian kinerja dari program/kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran yang lalu.
2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/kegiatan.
3. Menyusun strategi agar mencapai tingkat capaian kinerja yang optimal terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang akan datang.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai bentuk pertanggungjawaban.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk peningkatan kinerja.
3. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*.

D. Aspek Strategis Organisasi

1. Visi dan Misi

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Magelang tahun 2005–2025 dengan Visi RPJP Kabupaten Magelang adalah : “Kabupaten Magelang Yang Maju, Sejahtera dan Madani”. Untuk mewujudkan visi tersebut dengan memperhatikan situasi, kondisi, kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan Kabupaten Magelang, dan memperhitungkan kontinuitas pelaksanaan pembangunan, maka ditetapkan moto pembangunan Kabupaten Magelang yaitu “**Gemah Ripah Iman Cemerlang**” disingkat “**Gemilang**”.

Dalam mewujudkan visi RPJPD maka ditetapkan visi Pembangunan Kabupaten Magelang untuk Tahun 2019 - 2024 adalah: **Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah (Sedaya Amanah).** Visi Kepala Daerah tersebut menjadi Visi yang harus diemban oleh setiap PD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang.

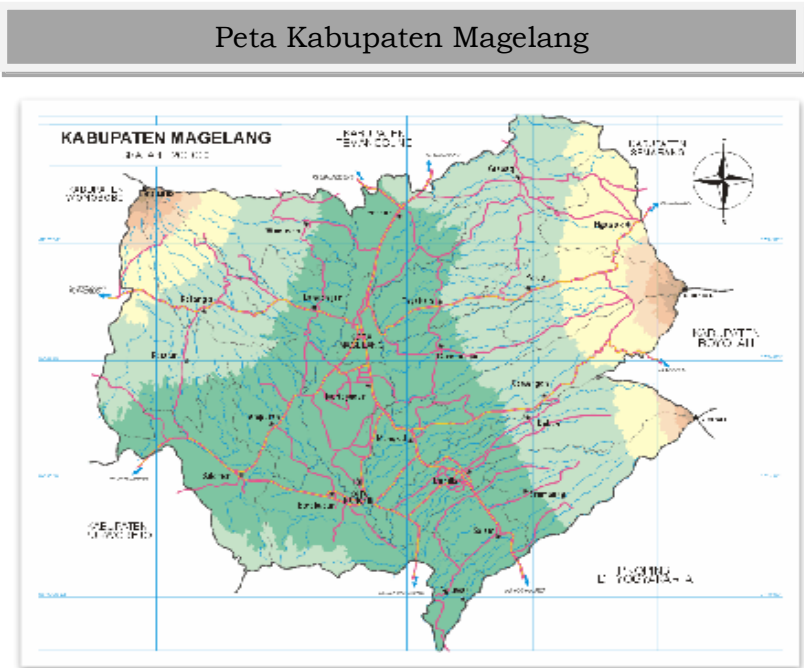
Titik berat pada Sekretariat Daerah adalah menjalankan visi AMANAH dalam visi Bupati Magelang, konsep amanah secara garis besar adalah menciptakan kerja sama yang baik dengan semua elemen masyarakat. Amanah merupakan kunci kemakmuran masyarakat yang menjadi perekat sosial yang mampu membentuk solidaritas dan jaringan antara lapisan masyarakat. Amanah harus memberikan inisiatif konsep moral, variatif, argumentatif yang bermanfaat dan aktual bagi kehidupan manusia mencakup aspek agama, sosial, hukum, ekonomi, politik dan budaya, sehingga dapat diwujudkan masyarakat Kabupaten Magelang yang menegakkan amanah (*high trust society*). Amanah mengandung pesan kesetiaan, kepercayaan dan kejujuran. Visi Amanah akan dicapai dengan meningkatkan kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan demokratis, serta meningkatkan keamanan dan ketenteraman masyarakat.

Terdapat 3 misi sebagai penjabaran visi Bupati Magelang dimana Sekretariat Daerah menjalankan misi Bupati Magelang yang ke 3, yaitu “Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang amanah” dengan sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas kebijakan kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah dan Meningkatkan kualitas pelayanan publik kesekretariatan daerah”. Dengan kata lain Sekretariat Daerah merupakan bagian dari sistem pemerintahan Kabupaten Magelang dengan kewajiban mengemban, melaksanakan dan mendukung misi Kepala Daerah untuk mewujudkan visi yang telah dicita-citakan.

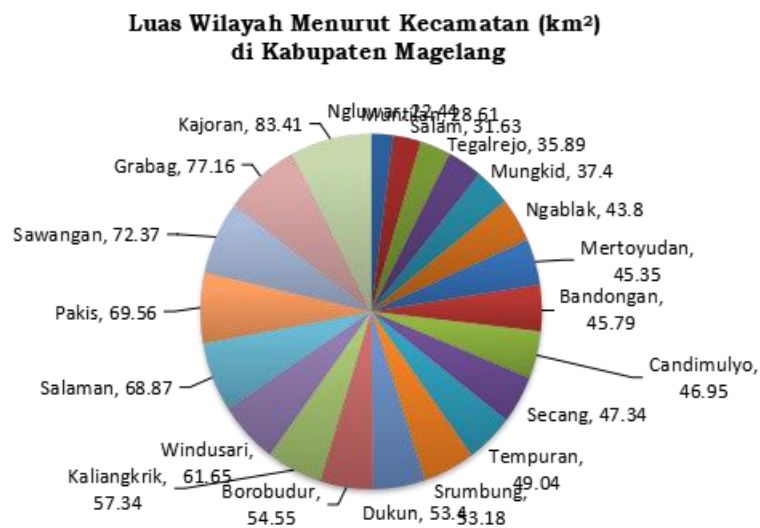
2. Letak Geografis

Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang, berada tepat di pusat ibukota Kabupaten Magelang yaitu di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 59, Kota Mungkid, Kecamatan Mungkid dengan wilayah kerja di seluruh wilayah Kabupaten Magelang. Kabupaten Magelang merupakan salah satu kabupaten yang ada di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis Kabupaten Magelang terletak diantara 110° - 01' - 51" Bujur Timur, 110° - 26' - 58" Bujur Timur, 7° - 19' - 13" Lintang Selatan dan 7° - 42' - 16" Lintang Selatan.

Kabupaten Magelang berbatasan dengan beberapa kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Purworejo dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), sebelah timur berbatasan



dengan Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo. Selain berbatasan dengan 5 kabupaten dan 1 daerah istimewa di sebelah utara, selatan, timur dan barat Kabupaten Magelang juga berbatasan dengan Kota Magelang yang terletak ditengah-tengah wilayah Kabupaten Magelang.



3. Pembagian Wilayah Administrasi

Kabupaten Magelang secara administratif dibagi menjadi 21 kecamatan yang terdiri dari 367 desa dan 5 kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Magelang kurang lebih 1.085,73 km² (108.573 hektar) atau kurang lebih 3,34% dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Wilayah Kabupaten Magelang yang paling luas yaitu Kecamatan Kajoran sebesar 83,41 kilometer persegi. Sedangkan wilayah yang luasnya paling kecil yaitu Kecamatan Ngluwar sebesar 22,44 kilometer persegi, secara rinci dapat dilihat pada diatas.

4. Organisasi Perangkat Daerah

a. Dasar Hukum Organisasi

Dasar hukum pembentukan Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang adalah Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020; Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 75); dan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.

b. Tugas dan Fungsi Organisasi

Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang sebagai salah satu organisasi perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Magelang berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, tugas dan fungsi Sekretariat daerah adalah :

1) Tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang

Membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

- 2) Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang
 - a) Perumusan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Sekretariat Daerah;
 - b) Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
 - c) Pengoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - d) Pelayanan administratif, data, dan informasi kesekretariatan daerah;
 - e) Pembinaan aparatur sipil negara pada perangkat daerah;
 - f) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
 - g) Pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Sekretariat Daerah;
 - h) Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah; dan
 - i) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- c. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang, sebagai berikut:

 - 1) Sekretaris Daerah;
 - 2) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
 - a) Bagian Pemerintahan, membawahi:
 - Subkoordinator Administrasi Pemerintahan;
 - Subkoordinator Administrasi Kewilayahan; dan
 - Subkoordinator Kerjasama dan Otonomi Daerah.
 - b) Bagian Hukum, membawahi:
 - Subkoordinator Peraturan Perundang-undangan;
 - Subkoordinator Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - Subkoordinator Dokumentasi, Informasi, Evaluasi Hukum.
 - c) Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
 - Subkoordinator Bina Mental Spiritual
 - Subkoordinator Kesejahteraan Sosial; dan
 - Subkoordinator Kesejahteraan Masyarakat.
 - 3) Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi:
 - a) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahi:
 - Subkoordinator Pembinaan BUMD dan BLUD
 - Subkoordinator Perekonomian; dan
 - Subkoordinator Sumber Daya Alam.
 - b) Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi:
 - Subkoordinator Penyusunan Program;
 - Subkoordinator Pengendalian Program; dan
 - Subkoordinator Evaluasi dan Pelaporan.
 - c) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, membawahi:
 - Subkoordinator Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - Subkoordinator Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
 - Subkoordinator Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.
 - 4) Asisten Administrasi Umum, membawahi:
 - a) Bagian Organisasi, membawahi:
 - Subkoordinator Kelembagaan dan Analisis Jabatan;

- Subkoordinator Pelayanan Publik dan Tata Laksanaan; dan
 - Subkoordinator Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
- b) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, membawahi:
- Subbagian Protokol
 - Subbagian Komunikasi Pimpinan; dan
 - Subbagian Dokumentasi Pimpinan.
- c) Bagian Umum, membawahi:
- Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian
 - Subbagian Keuangan; dan
 - Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.

Struktur organisasi secara lengkap terlampir

d. Sumber Daya Manusia Aparatur

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang sampai dengan akhir Desember 2022 sebanyak 146 orang. Secara rinci data PNS di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 1.1.
Jumlah PNS Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022

No	Unit Kerja	Jumlah		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1	Sekretaris Daerah	1	0	1
2	Asisten	3	0	3
3	Staf Ahli	3	0	3
4	Bagian Pemerintahan	8	4	12
5	Bagian Hukum	2	11	13
6	Bagian Perekonomian dan SDA	5	2	7
7	Bagian Administrasi Pembangunan	2	5	7
8	Bagian Pengadaan Barang Jasa	18	12	30
9	Bagian Kesejahteraan Rakyat	9	2	11
10	Bagian Organisasi	5	4	9
11	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	6	6	12
12	Bagian Umum	22	16	38
Jumlah :		84	62	146

Sumber : Aplikasi Statistik BKPPD Kabupaten Magelang, Desember 2022



Sumber : Aplikasi Statistik BKPPD Kabupaten Magelang, Desember 2022

E. Permasalahan Utama Organisasi

Berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang diidentifikasi permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Masih dibutuhkannya Sumber Daya Manusia yang berkompeten di bidangnya sehingga mampu bersikap dan bertindak responsif terhadap seluruh kebijakan dari pemerintah pusat yang membutuhkan tindak lanjut peraturan di daerah.
2. Tindaklanjut peraturan teknis atas peraturan perundang-undangan yang baru masih sering terlambat yang mengakibatkan terlambatnya pengaturan di daerah.
3. Organisasi Perangkat Daerah yang belum sempurna, sehingga masih ditemukan tugas dan fungsi PD yang tumpang tindih yang berdampak pada kesalahan pola koordinasi, tugas dan fungsi yang terlewatkan, serta ditemukannya beban kerja yang berlebih.
4. Masih kurangnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai tugas dan fungsi masing-masing PD.

F. Sistematika

Sistematika penulisan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi peta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Bab ini memuat ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2022.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sub Bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi berdasarkan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

B. Realisasi Anggaran

Sub Bab ini diuraikan anggaran jumlah dan realisasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan Perubahan Perjanjian Kinerja 2022.

C. Prestasi

Sub Bab ini diuraikan prestasi yang diraih selama kurun waktu 2022.

BAB IV PENUTUP

Penutup memuat Kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran berisikan data pendukung berupa Struktur organisasi dan Realisasi Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2022 Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang.



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

PERENCANAAN KINERJA

A. Ikhtisar Perjanjian Kinerja

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Sekretaris Daerah dan Kepala Daerah dalam melaksanakan APBD Kabupaten Magelang berdasarkan APBD Perubahan tahun anggaran 2022, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1. Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun anggaran 2022
Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas penyusunan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	Cakupan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	100 %
2.	Meningkatnya kualitas penyusunan kebijakan ekonomi dan pembangunan	Cakupan perumusan kebijakan ekonomi dan Pembangunan	90 %
3	Meningkatnya kualitas administrasi umum kesekretariatan daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	84,25 (Baik) -

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah tahun 2022.

Pada Penetapan Perubahan Kinerja tahun 2022 Sekretariat Daerah dalam melaksanakan 3 (tiga) sasaran strategis memiliki indikator kinerja sebanyak 3 indikator kinerja. Untuk melaksanakan sasaran strategis dan mencapai target pada indikator kinerja maka dianggarkan program-program sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Jumlah Anggaran Per Program dalam Pelaksanaan
Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2022
Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang

No	Program	Pagu
1	2	3
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	18,903,015,185
2	Program Perekonomian dan Pembangunan	1,639,698,985
Sub Jumlah (Belanja Non Eks BAU) :		20,542,714,170
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah (Belanja Eks BAU Non Gaji dan Tunjangan ASN) :	14,453,360,762
Jumlah :		34,996,074,932

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah tahun 2022.

Jumlah program yang dilaksanakan pada tahun 2022 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang sebanyak 3 Program dengan jumlah anggaran sebesar Rp 34.996.074.932,00 (Tiga puluh empat milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta tujuh puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) diluar anggaran gaji dan tunjangan ASN Sekretariat Daerah. Secara detail indikator kinerja dan penganggaran terinci pada Perubahan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 sebagaimana terlampir.

Semua Kegiatan yang dilaksanakan di Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang bersumberkan dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magelang Tahun 2022, dan tidak terdapat anggaran yang bersumber pada APBN dan BLN.

Untuk mengetahui dukungan penganggaran terhadap capaian kinerja pada tiap sasaran strategis, maka dilakukan pemetaan program dan anggaran per sasaran strategis Tahun 2022 Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang sebagai berikut :

Tabel 2.3.
Pemetaan Program dan Anggaran per Sasaran Strategis Tahun 2022
Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran	% Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas penyusunan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	Cakupan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	100%	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	18,903,015,185	54.01
	Meningkatnya kualitas penyusunan kebijakan ekonomi dan pembangunan	Cakupan perumusan kebijakan ekonomi dan Pembangunan	90%	Program Perekonomian dan Pembangunan	1,639,698,985	4.69
2	Meningkatnya kualitas administrasi umum kesekretariatan daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	84,25 (Baik) -	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14,453,360,762	41.30
Jumlah :					34,996,074,932	100.00

Sumber : RAPK Sekretaris Daerah tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat dukungan pendanaan dalam mencapai sasaran strategis untuk mencapai target dari tiap indikator kinerja sasaran strategis.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang merupakan perwujudan kewajiban Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja Organisasi.

B. Analisis dan Evaluasi Kinerja 2022

pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang untuk tahun 2022. Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang berusaha konsisten dalam hal pelaporan akuntabilitas, sehingga apa yang dilaporkan merupakan apa yang dilaksanakan dan diukur, apa yang dilaksanakan merupakan apa yang ditulis, sedangkan apa yang ditulis merupakan apa yang direncanakan.

Pada bab ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan tersebut.

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran capaian kinerja berdasarkan tingkat pencapaian sasaran strategis berdasarkan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang tahun 2022 pada anggaran perubahan dan dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran strategis, dan juga dibandingkan dengan capaian realisasi pada tahun sebelumnya serta dibandingkan dengan target capaian pada akhir periode RPJMD.

Pengukuran pencapaian kinerja menggunakan rumus penghitungan capaian kinerja berdasarkan jenis indikator, yang dibagi menjadi dua jenis indikator, yaitu: *indikator positif* dan *indikator negatif*, dengan rumus penghitungan sebagai berikut :

➤ *Indikator Positif apabila semakin tinggi realisasi maka semakin tinggi capaian kinerja, dengan rumus:*

Persentase Capaian Kinerja
(Indikator Positif)

=

Realisasi

Rencana

X 100 %

➤ *Indikator Negatif apabila semakin tinggi tinggi realisasi maka semakin rendah capaian kinerja, untuk membedakan indikator posotif dan indikator negatif, maka selanjutnya indikator negatif diberi (*) tanda bintang pada indikator kinerja yang dinilai, dengan rumus:*

Persentase
Capaian Kinerja
(Indikator
Negatif)

=

Rencana - (Realisasi-
Rencana)

Rencana

X 100

%

Untuk mengukur tingkat capaian kinerja mengacu interval realisasi kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pengukuran dibuat skala pengukuran ordinal dengan pemberian predikat berdasarkan persentase capaian dari masing-masing indikator dengan interval nilai realisasi kinerja sebagaimana pada tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1. Interval Nilai, Kriteria Penilaian dan Predikat Realisasi Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Predikat Penilaian Realisasi Kinerja	Kode Warna
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	
2	76% ≤ 90%	Tinggi	
3	66 % ≤ 75%	Sedang	
4	51% ≤ 65%	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 tahun 2017, pemberian warna untuk mempermudah dalam membaca kriteria penilaian

2. Capaian Kinerja Sasaran

Persentase capaian kinerja per sasaran strategis dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi tahun 2022, dan membandingkan capaian kinerja sasaran pada tahun sebelumnya, serta membandingkan antara realisasi kinerja per sasaran tahun 2022 dengan akhir periode Renstra Sekretariat Daerah pada tahun 2024, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2024)	Capaian 2022 terhadap 2024 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3		5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya kualitas penyusunan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	Cakupan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	NA	100.00	100.00	100%	100.00	100.00%
2	Meningkatnya kualitas penyusunan kebijakan ekonomi dan pembangunan	Cakupan perumusan kebijakan ekonomi dan Pembangunan	NA	90.00	90.00	100%	100.00	90.00%
3	Meningkatnya kualitas administrasi umum kesekretariatan daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	84.16	84.25	84.35	100%	85.00	99.24%
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis :						100%		96.41%

Sumber : Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang 2022

Berdasarkan tabel 3.2 rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang tahun 2022 sebesar 100% (sangat tinggi) dibandingkan dengan target tahun 2024 pada akhir periode Renstra capaian sebesar 96,41% (*Sangat Tinggi*) maka capaian tahun 2022 tidak terlalu jauh dari capaian akhir Renstra tahun 2024 dengan selisih sebesar 3,59%.

3. Realisasi Keuangan Tahun 2022
- Realisasi keuangan untuk mencapai target indikator pada sasaran strategis pada tahun 2022, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Realisasi Anggaran Per Program Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	8,903,015,185	8,711,452,950	98.99
2	Program Perekonomian dan Pembangunan	1,639,698,985	1,415,559,187	86.33
Sub Jumlah (Belanja Non Eks BAU) :		20,542,714,170	20,127,012,137	97.98
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14,453,360,762	3,890,927,202	96.11
	Sub Jumlah (Belanja Eks BAU diluar Gaji dan Tunjangan ASN)	14,453,360,762	13,890,927,202	96.11
Jumlah :		34,996,074,932	34,017,939,339	97.21

Sumber : SIPD Kabupaten Magelang 2022

Dalam pelaksanaan sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang didukung 3 program dengan jumlah anggaran Rp 34.996.074.932,00 (Tiga puluh empat milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta tujuh puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) realisasi anggaran dalam menunjang capaian sasaran strategis sebesar Rp 34.017.939.339,00 (Tiga puluh empat milyar tujuh belas juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah) atau sebesar 97.21%, persentase realisasi keuangan masuk dalam katagori *Sangat tinggi*, dengan capaian tertinggi terdapat pada Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebesar 98,99% dan capaian terendah terdapat pada Program Perekonomian sebesar 86,33%, sehingga realisasi anggaran tersebut masuk dalam kategori *tinggi*.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2022

Berdasarkan pelaksanaan dari Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022, maka dilakukan evaluasi dan analisis capaian kinerja selama tahun 2022 terhadap 3 (tiga) sasaran

strategis dan 3 (tiga) indikator kinerja yang dilaksanakan oleh sembilan bagian yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang. Penetapan Kinerja didasarkan pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 yang mengacu pada Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang 2019-2024. LKjIP ini merupakan laporan akuntabilitas kinerja yang disusun berdasarkan target pada tahun ketiga dari Renstra Sekretariat Daerah 2019-2024.

Capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang tahun 2022 tercermin dalam pencapaian sasaran-sasaran strategis yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pelaporan kinerja dipilah-pilah berdasarkan sasaran strategis, dimana pencapaian kinerja seluruh sasaran strategis tahun 2022, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas penyusunan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan Kesejahteran rakyat

Tabel 3.5
Capaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah
Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2024)	Capaian 2022 terhadap p 2024 (%)
				Target	Realisasi	%		
1	2	3		5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya kualitas penyusunan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan Kesejahteran rakyat	Cakupan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	NA	100	100	100	100	100%

Sumber : Bagian adminbang Sekretariat Daerah tahun 2022, data diolah

Bedasarkan tabel diatas capaian Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas penyusunan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan Kesejahteran rakyat sesuai dengan target yang ditetapkan pada tahun 2022 dan terhadap target akhir Renstra pada tahun 2024 sebesar 100% (*Sangat Tinggi*).

Penunjang keberhasilan : tingginya capaian kinerja pada program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada indikator Cakupan penyusunan produk hukum daerah, penanganan permasalahan hukum dan pendokumentasian produk hukum daerah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 110,61%, hal tersebut dikarenakan adanya perubahan kebijakan pemerintah pusat sehingga berdampak pada

perubahan/penyesuaian regulasi ditingkat pemerintah daerah dan penetapan target capaian yang tidak mempertimbangkan hal tersebut.

Permasalahan : permasalahan yang terkait cakupan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat antara lain :

1. Efek dari pandemi covid 19 mengakibatkan beberapa indikator penunjang sasaran/program pendukung tidak dapat dilaksanakan secara maksimal terutama kegiatan yang bersifat tatap muka.
2. Adanya kebijakan/regulasi terkait perencanaan dan penganggaran, sehingga terdapat beberapa indikator pendukung sasaran program yang masih dalam masa transisi akibat perpindahan tugas dan fungsi antar bagian dilingkungan Sekretariat Daerah.
3. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas belum dilaksanakan secara optimal.

Alternatif solusinya

1. Menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja dengan mewajibkan bagian-bagian dilingkungan Setda untuk mempertanggungjawabkan kinerja pada tahun sebelumnya sesuai dengan PK dan melakukan reuiu yang mencakup reuiu tujuan dan sasaran, dengan dilengkapi IKU yang relevan, spesifik, dan terukur dan benar-benar sesuai dengan tugas dan fungsi yang dijalankan oleh masing-masing bagian.
2. Pelaksanaan perencanaan dan penganggaran dilingkungan Sekertariat Daerah untuk mempedomani Perubahan Renstra Sekretariat Daerah dengan mencermati indikator-indikator yang belum tercapai serta memprioritaskan pencapaiannya pada tahun anggaran selanjutnya, sehingga setiap indikator dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
3. Memastikan bahwa Perjanjian Kinerja menjadi instrumen manajemen untuk monitoring dan evaluasi, penilaian kinerja satuan kerja dan individu, pemberian penghargaan atau sanksi;

Program yang menunjang pencapaian sasaran strategis cakupan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat didukung oleh Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 8,903,015,185 dengan realisasi sebesar Rp. 8,711,452,950 atau 98,99%.

2. Sasaran strategis Meningkatnya kualitas penyusunan kebijakan ekonomi dan pembangunan

Tabel 3.6
 Capaian indikator kinerja sasaran strategis Meningkatnya kualitas penyusunan kebijakan ekonomi dan pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2024)	Capaian terhadap 2022 terhadap 2024 (%)
				Target	Capaian	%		
1	2	3		5	6	7	8	9
2	Meningkatnya kualitas penyusunan kebijakan ekonomi dan pembangunan	Cakupan perumusan kebijakan ekonomi dan Pembangunan	NA	90.00	90.00	100	100	90.00%
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis :						100		90.00%

Sumber : Bagian adminbang Sekretariat Daerah tahun 2022, data diolah,

Bedasarkan tabel diatas capaian Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas penyusunan kebijakan ekonomi dan pembangunan telah mencapai target yang ditetapkan yaitu mencapai 100% (*Sangat tinggi*) sedang capaian terhadap target akhir Renstra pada tahun 2024 mencapai 90,00 % (*Tinggi*).

Penunjang keberhasilan : capaian indikator tersebut merupakan cerminan dari indikator Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang terfasilitasi , Cakupan penyusunan pedoman perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah dan Tingkat Kematangan UKPBJ.

Dari 9 variabel yeng ditetapkan, pada tahun 2022 ditarget 4 variabel dan tercapai 100%. Tingkat kematangan UKPBJ terdiri dari 4 (empat) domain, yaitu kelembagaan, SDM Proses dan Sistem Informasi, dan 9 (sembilan) variebel yaitu Variabel Pengorganisasian, Variabel Tugas dan Fungsi, Variabel Perencanaan, Variabel Pengembangan, Variabel Manajemen Pengadaan, Variabel Manajemen Penyedia, Variabel Manajemen Kinerja, Variabel Manajemen Risiko dan Variabel Sistem Informasi.

Permasalahan yang dihadapi adalah terkait dengan *e-office*, yang pelaksanaannya tergantung dengan aplikasi, sarana prasarana, Sumber Daya Manusia, sehingga belum bisa diaplikasikan secara menyeluruh

Alternatif solusinya adalah dengan menerapkannya secara gradual/bertahap dan terus meningkatkan koordinasi dengan instansi

terkait.

Program yang menunjang pencapaian sasaran strategis adalah Program Perekonomian dan Pembangunan. Dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp 1,639,698,985,00 dengan realisasi anggaran Rp. 1,415,559,187,00 atau 86.33%. Serapan anggaran yang tidak maksimal dikarenakan adanya alokasi anggaran bersumber dana DBHCHT dimana terkait penggunaannya sudah ditentukan melalui PMK 215/PMK.07/2021 tentang penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana dbhcht. Namun dalam pencapaian indikator sasaran/program tetap dapat berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan.

- 3. Sasaran Strategis Meningkatkan kualitas administrasi umum kesekretariatan daerah

Tabel 3.7
Capaian indikator kinerja sasaran Strategis Meningkatkan kualitas administrasi umum kesekretariatan daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2024)	Capaian terhadap 2022 terhadap 2024 (%)
				Target	Capaian	%		
1	2	3		5	6	7	8	9
3	Strategis Meningkatkan kualitas administrasi umum kesekretariatan daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	84.16	84.25	84.35	100.12	85.00	99.24%
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis :						100,12		99.24%

Sumber : Bagian adminbang Sekretariat Daerah tahun 2022, data diolah,

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2022 dilaksanakan pada 3 Unit Pelayanan Publik, yaitu Bagian Umum, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat secara komulatif tahun 2022 adalah 84.35 (delapan puluh empat koma tiga puluh lima). Hal ini menunjukkan secara umum kualitas pelayanan Unit Pelayanan Publik di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang masuk kategori Baik (77,61 – 88,30).

Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat secara komulatif tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 0,19 (nol koma sembilan belas) dari

Indeks Kepuasan Masyarakat tahun sebelumnya (2021) dengan nilai IKM sebesar 84.16. hal tersebut mencerminkan bahwa kepuasan masyarakat terhadap pelayanan sekretariat Daerah semakin baik

Penunjang keberhasilan : adanya pembagian tugas pokok dan fungsi serta kejelasan pelaksanaan tugas antar bagian.

Permasalahan yang dihadapi adalah terkait dengan *e-office*, yang pelaksanaannya tergantung dengan aplikasi, sarana prasarana, Sumber Daya Manusia, sehingga belum bisa diaplikasikan secara menyeluruh.

Alternatif solusinya adalah dengan menerapkannya secara gradual/bertahap.

Program yang menunjang pencapaian sasaran strategis adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp 14.453.360.762,00 dengan realisasi anggaran Rp. 13.890.927.202,00 atau 97.11% tidak termasuk anggaran gaji ASN

C. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya dilakukan apabila capaian kinerja mencapai 100 % (seratus persen), pada Sekretariat Daerah dari 3 (tiga) sasaran kinerja dengan nilai kinerjanya 100%, dimana tingkat efisiensi masing-masing sasaran tersaji dalam tabel 3.7 sebagai berikut :

Tabel 3.7
Analisis efesiensi Penggunaan Sumberdaya pada
Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Indikator Kinerja yang $\geq 100\%$	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efesiensi (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas penyusunan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan Kesejahteran rakyat	Cakupan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan Kesejahteran rakyat	100	98.99	1.01
2	Meningkatnya kualitas penyusunan kebijakan ekonomi dan	Cakupan perumusan kebijakan ekonomi dan Pembangunan	100	86.33	13.67

	pembangunan				
3	Meningkatnya kualitas administrasi umum kesekretariatan daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	100	96.11	3.89
Rata-rata tingkat efisiensi :					6.17

Sumber : Bagian adminbang Sekretariat Daerah tahun 2022, data diolah,

D. Prestasi

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang tahun 2022 membuahkan hasil berupa prestasi sebagai berikut:

1. Peringkat Peringkat 6 penerima JDIH awards tahun 2022 tingkat nasional kategori kabupaten



2. Terbaik 3 JDIH tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022



3. Penghargaan kabupaten/kota peduli Ham tahun 2022



4. Penghargaan sebagai organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan Rekomendasi Kegiatan Statistik Tahun 2022





BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

P
e
n
u
t
u
p

disusun sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi dan misi serta dalam rangka mewujudkan *good governance* pada instansi pemerintah. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian kinerja atas akuntabilitas dilihat dari capaian kinerja organisasi maupun dilihat dari pemanfaatan sumberdaya termasuk didalamnya dalam pemanfaatan anggaran

Keberhasilan pembangunan di Kabupaten Magelang sebagaimana dituangkan dalam dokumen ini, merupakan kerja keras seluruh aparatur Pemerintah Daerah di lingkungan Sekretariat Kabupaten Magelang dan dukungan serta partisipasi masyarakat serta dan berbagai elemen kemasyarakatan, dunia usaha dan pendidikan yang telah memberikan sumbangsihnya untuk kemajuan Kabupaten Magelang.

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 telah mencapai 100,00% (*Sangat Tinggi*) dibandingkan dengan target tahun 2024 pada akhir periode Renstra dengan capaian 96,41% (*Sangat Tinggi*), maka capaian tahun 2022 telah mencapai target sasaran strategis yang telah ditetapkan. pelaksanaan sasaran strategis Sekretariat Daerah didukung 3 program dengan jumlah anggaran Rp 34.996.074.932,00 (tiga puluh empat milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta tujuh puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) dan realisasi anggaran dalam menunjang capaian sasaran strategis sebesar Rp 34.017.939.339,00 (tiga puluh empat milyar tujuh belas juta sembilan ratus tiga puluh sembla ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah) atau (97,21%), presentasi realisasi keuangan masuk dalam katagori *Sangat baik*. Efisiensi capaian kinerja sasaran strategis atas penggunaan sumberdaya sebesar 6,19%, tetapi tingkat efesiensi ini belum mencerminkan efektifitas penggunaan sumberdaya khususnya dalam penggunaan anggaran, sehingga perlu dilakukan analisa yang lebih mendalam atas persentase penyerapan anggaran dibandingkan dengan realisasi fisik per kegiatan.

Harapan kami untuk tahun-tahun mendatang LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang selain berfungsi untuk mengukur keberhasilan dan atau kegagalan dalam menjalankan misi dan sasaran strategis organisasi, juga dapat digunakan sebagai upaya memacu usaha peningkatan kinerja dan pelayanan publik, dan dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki keputusan dan kebijakan dari pemerintah.

Demikian LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang yang menggambarkan capaian kinerja sasaran srategis dan indikator kinerja utama pada tahun 2022 dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Magelang.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. ADI WARYANTO
Jabatan : SEKRETARIS DAERAH
selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : ZAENAL ARIFIN, S.IP
Jabatan : BUPATI MAGELANG
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kota Mungkid, 3 Januari 2022

PIHAK KEDUA

ZAENAL ARIFIN, S.I.P

PIHAK PERTAMA

Drs. ADI WARYANTO
Pembina Utama Madya
NIP. 19660304 199203 1 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

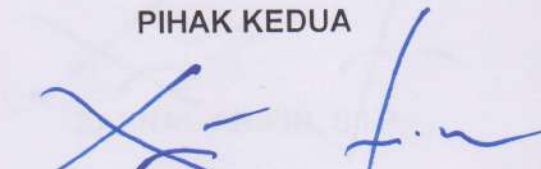
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas penyusunan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	Cakupan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	100 %
2.	Meningkatnya kualitas penyusunan kebijakan ekonomi dan Pembangunan	Cakupan perumusan kebijakan ekonomi dan Pembangunan	90 %
3	Meningkatnya kualitas administrasi umum kesekretariatan daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	84,25 (Baik) -

No	Program		Keterangan Sumber Dana
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	11.778.117.461	Semua kegiatan yang dilaksanakan di Sekretariat
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	17.158.589.110	Daerah Kabupaten Magelang bersumberkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magelang Tahun 2022
3	Program Perekonomian dan Pembangunan	6.671.474.010	


Jumlah : 35.608.180.581

Kota Mungkid, 3 Januari 2022

PIHAK KEDUA


ZAENAL ARIFIN, S.IP

PIHAK PERTAMA


Drs. ADI WARYANTO
Pembina Utama Madya
NIP. 19660304 199203 1 007